

**IMPLEMENTASI PROGRAM KALI BERSIH DI KOTA SEMARANG
DALAM MENANGGULAGIPENCEMARAN LINGKUNGAN**

Oleh :

Anis Khairun Nisa'

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos
1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

Abstrak

Banyaknya kegiatan industri dan masyarakat menyebabkan rusaknya ekosistem sungai dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tujuan adanya Implementasi Program Kali Bersih (PROKASIH) di Kota Semarang untuk menangani pencemaran sungai yang semakin memburuk. Fokus penelitian ini adalah Program Kali Bersih di Kota Semarang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program Kali Bersih di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Kali Bersih di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kali bersih sudah berjalan dengan baik meskipun hal ini masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti, sikap masyarakat yang masih membuang sampah di sungai dan pembuangan limbah industri yang tidak sesuai dengan baku mutu air limbah. Sehingga hal ini perlu upaya yang keras dalam meningkatkan dukungan kelompok sasaran Program Kali Bersih dalam upaya pemberian sanksi yang tegas terhadap pencemaran lingkungan.

Kata Kunci: Implementasi, Program kali bersih, Pencemaran lingkungan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan bersih merupakan hal terpenting dalam kehidupan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran. Kota Semarang merupakan pusat industri terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Menurut data yang diterbitkan BPS Provinsi Jawa Tengah, jumlah industri besar dan sedang di Kota Semarang mencapai 364 buah dengan nilai output sebesar RP 17 triliun. Sebagian besar industri besar atau menengah ini merupakan industri manufaktur dan berorientasi ekspor. Seperti PT Ungaran Sari Garmen, PT Apec Inti Corpora, PT Sido Muncul, PT Batam Tekstil Industri, PT Fixo Furniture yang merupakan perusahaan eksportir dengan bahan baku industri besar berasal dari luar Kabupaten Semarang. Pencemaran Pembuangan limbah baik industri, hotel, rumah sakit, limbah masyarakat dapat berdampak pada kualitas air di kota Semarang. Sedangkan masyarakat kota Semarang sangat membutuhkan air bersih untuk kebutuhan hidupnya.

Untuk menangani ancaman pencemaran tersebut, Bapedalda mengembangkan pola pelaksanaan Program Kali Bersih (Prokasih) di Kota Semarang yang dikonsentrasikan di DAS Kaligarang. Pada program tersebut, setiap industri diharuskan mengolah limbah sebelum dibuang sesuai dengan Baku Mutu Air Limbah. Selain itu, tahun ini Bapedalda Jateng sedang menyusun Rencana Induk Pengelolaan Lingkungan Berbasis Sungai. Dalam rencana tersebut, sejumlah permasalahan lingkungan yang didata sepanjang DAS akan diselesaikan dengan pendekatan sosial.

Selain itu, dari hasil penelitian pada kualitas air sungai Garang, saat ini mengalami penurunan, khususnya penggal sungai yang berada di Kota Madya Semarang Wilayah barat, tingkat pencemarannya termasuk tinggi sebagai akumulasi limbah yang berasal dari hulu maupun intensitas aktif perkotaan yang tidak memperhatikan lingkungan yang memberikan kontribusi penurunan kualitas air sungai Garang sebagai akibat buangan limbah industri.

Tujuan diadakannya Program Kali Bersih (PROKASIH) bertujuan untuk tercapainya kualitas air sungai yang baik, sehingga dapat meningkatkan fungsi sungai dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan, terciptanya sistem kelembagaan yang mampu melaksanakan pengendalian pencemaran air secara efektif dan efisien, terwujudnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengendalian pencemaran air.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka penulis mengambil judul “IMPLEMENTASI

PROGRAM KALI BERSIH DI KOTA SEMARANG DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Kali Bersih (PROKASIH) Di Kota Semarang dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan?
2. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Implementasi Program Kali Bersih (PROKASIH)

Di Kota Semarang dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan Implementasi Program Kali Bersih (PROKASIH) Di Kota Semarang dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan.
2. Mengidentifikasi hal-hal yang dapat mempengaruhi Implementasi Program Kali Bersih (PROKASIH) Di Kota Semarang dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan

D. Kajian Pustaka

1. Administrasi Publik

Menurut **Edward H. Litchfield**, administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. (Inu Kencana Syafiie,2006:25).

Menurut **Nicolas Henry** (1988), mengartikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang

kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

2. Kebijakan Publik

Menurut Carl Friedrich kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu (Indiahono,2009:18).

3. Menurut RC. Chandler dan JC. Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya- sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. A. Hoogerwerf, kebijakan publik sebagai unsur penting dari publik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. (Syafiie,2006:105)

4. Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Agustino,2006: 139).

Menurut Grindle juga memberikan padangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah (Winarno,2008:146).

5. Model Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Menurut pandangan Edwards III, ada empatfaktor yang mempengaruhi keberhasilan atau

kegagalan implementasi kebijakan diantaranya:

1. Sumber daya. Sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Jika peleksana kebijakan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumberdaya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakn tidak akan efektif dan efisien. Sumber daya sebagai mana telah disebutkan meliputi:
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Sumber Daya Anggaran
 - c. Sumber Daya Peralatan
 - d. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan
2. Struktur Birokrasi. Dalam struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.
3. Disposisi. . Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

4. Komunikasi. Komunikasi merupakan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Menurut Donal Van Meter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan.
2. Sumber Daya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Karakteristik Agen Pelaksana. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri

yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya

4. Sikap/ Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

6. Pencemaran

Setiap kegiatan manusia akan menambah materi atau energi pada lingkungan. Apabila materi atau energi itu membahayakan, atau mengancam kesehatan manusia,

miliknya atau sumber daya, baik langsung maupun tidak langsung dikatakan terjadi pencemaran. (Silalahi,2001:154)

Menurut Darmono pencemaran merupakan adanya benda-benda asing yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya secara normal disebut dengan pencemaran air. Karena kebutuhan makhluk hidup akan air sangat bervariasi, maka batas pencemaran untuk berbagai jenis air juga berbeda-beda. (Darmono, 1995: 2)

7. Program Kali Bersih

Program Kali Bersih dalam Permen No 32 Tahun 1995 tentang Program Kali Bersih dalam pasal 1 Program Kali Bersih disingkat dengan PROKASIH merupakan program kerja pengendalian pencemaran air sungai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan desai penelitian deskriptif. Peneliti

melakukan Penelitian di kota Semarang hal ini difokuskan pada pelaksana Program Kali Bersih (PROKASIH) di Kota Semarang. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sedangkan pada fenomena penelitian, peneliti menggunakan 5 indikator untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program kali bersih yaitu:

1. Penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup.
3. Penyelenggaraan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
4. Pengawasan dampak lingkungan
5. Penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan.

Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan berjalannya implementasi program kali bersih di Kota Semarang akan ditelusuri atau dicari dilapangan pada saat penelitian. Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan

metode kualitatif yang bersifat deskriptif maka dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itusendiri

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen mengenai program kali bersih. Di dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen. Sedangkan dalam analisis data peneliti menggunakan model Spradley dalam pengambilan teknik analisis data menggunakan analisis taksonomi.

. Sedangkan, untuk menguji kualitas data peneliti menggunakan teknik triangulasi data, dengan mengecek data dari berbagai sumber menggunakan berbagai cara sehingga diperoleh hasil yang mudah dipahami peneliti.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1.1 Implementasi Program Kali Bersih Kota Semarang Dalam Menanggulangi Pencemaran

Terdapat 5 indikator yang digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan program kali bersih di Kota Semarang:

1. Penyelenggaraan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran.
 - a. Pengelolaan Kualitas Air. pengelolaan kualitas air dilakukan oleh pihak ketiga atau infestor dan pemerintah hanya melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap kondisi kualitas air.
 - b. Pengendalian Pencemaran Air. Pengendalian pencemaran air sudah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah baik dari pengawasan, sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Namun lagi-lagi pelaksanaan pemerintah belum mencapai keberhasilan. Hal ini masih ditemukan kendala-kendala pemerintah dalam melakukan pengendalian pencemaran diantara pembuangan limbah yang tidak sesuai baku mutu air dan pembuangan limbah domestic atau

limbah padat yang dihasilkan oleh masyarakat.

2. Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Badan Lingkungan Hidup. Pada implementasi program kali bersih di Kota Semarang terdapat dua proses komunikasi yang terjadi, yaitu transformasi informasi antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran ; serta transformasi informasi antar para pelaksana kebijakan.
3. Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pengelolaan (B3) yang dilakukan pemerintah saat ini hanya pada tahap penanganan saja akan tetapi para industri diwajibkan memiliki alat pengelolaan limbah yang dihasilkan industri tersebut. Pemerintah dalam pengelolaan limbah hanya berfokus pada pengelolaan limbah yang di timbulkan oleh para indutri dan tidak menfokuskan juga pada limbah domestik yang diakibatkan oleh masyarakat. Sehingga dalam hal ini dalam menanggulangi pencemaran masih belum efektif

karena pencemaran tidak hanya dilakukan oleh industry saja melainkan juga dari kegiatan masyarakat.

4. Pengawasan Dampak Lingkungan. Pada tahap pengawasan ini, pemerintah melakukan pengawasan terhadap industri yang berada dipinggir bantara sungai. Namun hal ini sangat disayangkan karena pada proses pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Semarang hanya terfokus pada pengawasan indutstri saja dan belum ada pengawasan terhadap masyarakat yang membuang limbahnya kesungai.
5. Penyelenggaraan Penegakan Hukum Lingkungan. Payung hukum merupakan hal terpenting dalam menanggulangi pencemaran lingkungan khususnya daerah sungai di Kota Semarang. Oleh karena itu pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan sangat strategis bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar.

A. Faktor Pendukung Implementasi Program Kali Bersih Kota

Semarang Dalam Menaggulangi Pencemaran

1. Kebijakan. Kota Semarang sendiri mempunyai banyak peraturan yang menunjang terlaksananya program kali bersih sehingga hal ini sangat memudahkan pemerintah dalam pelaksanaan program kali bersih itu sendiri.
2. Pelaksana Kebijakan. Salain kebijakan faktor pendorong pelaksanaan Implementasi Program Kali Bersih adalah dari para pelaksana kebijakan sendiri. Dalam hal ini pemerintah dalam mengatasi pencemaran kualitas air cukup baik.
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana. Pemerintah dalam pelaksanaan program kali bersih sudah memiliki sarana dan prasarana untuk memudahkan para pelaksana program kali bersih seperti adanya laboratorium untuk mengecek kualitas air setiap tahunnya.
4. Komitmen. Pemerintah memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas air di Kota Semarang dengan melakukan program kali bersih sebagai penanggulangan pencemaran kualitas air.

5. Komunikasi. Komunikasi yang dilakukn pemerintah tidak hanya kepada para pelaksana program kali bersih saja tapi hal ini juga kepada kelompok sasaran dengan melakukan sosialisasi. Agar mereka bisa memahami pentingnya menjaga lingkungan sehat.

B. Faktor Penghambat Implementasi Program Kali Bersih Kota Semarang Dalam Menaggulangi Pencemaran.

1. Sumber Daya Anggaran.. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan pelaksanaan program kali bersih tidak berjalan secara maksimal.
2. Masyarakat. Prilaku masyarakat yang tidak memperhatikan dampak pembuangan limbah menyebabkan penghambat pelaksanaan program kali bersih.
3. Perkembangan Perekonomian. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang juga turut menentukan keanekaragaman industri di Kota Semarang, semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin beranekaragam jenis

industri.Sedangkan limbah yang dihasilkan oleh industri penyebab utama terjadinya pencemran air.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan bahwa pelaksanaa program kali bersih sudah dilaksanakan meskipun dalam hal ini masih ditemukan kendala-kendala yang mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan program kali bersih di Kota Semarang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program kali bersih terdiri dari faktor pendorong dan faktor penghambat.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Kali Bersih Kota Semarang peneliti memberika beberapa saran antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kota Semarang
 - a. Diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya berfokus pada pencemaran industri saja, namun juga pada pencemaran yang dilakukan oleh masyarakat. Limbah yang ada

- disungai tidak hanya dilakukan oleh para industri tapi melainkan juga dari aktifitas masyarakat. Sehingga dalam hal ini pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap masyarakat agar pencemaran air di Kota Semarang bisa diatasi.
- b. Diharapkan pemerintah tidak hanya memberikan sosialisasi tentang dampak pembuangan limbah namun juga diberikan pemberdayaan terhadap masyarakat agar masyarakat bisa mengelola limbah sendiri dan tidak membuang sampah ke sungai.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Diharapkan masyarakat ikut berperan dalam menjaga kelestarian kualitas air Kota Semarang. Sebagaimana diketahui masyarakat merupakan aktor utama dalam roda kehidupan.
 - b. Diharapkan masyarakat agar tidak membuang limbah ke sungai agar kelestarian lingkungan terjaga dan tidak mencemari kualitas air Kota Semarang. Sebagaimana diketahui air merupakan sumber daya alam yang paling utama dalam kehidupan.
- c. Diharapkan bagi masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemberian sosialisasi yang di laksanakan oleh pemerintah agar pencemaran sungai bisa teratasi. Serta agar memahami pentingnya hidup sehat dan tidak mencemari lingkungan khususnya air sungai.
3. Bagi Para Industri
 - a. Diharapkan bagi para industri untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan Kota Semarang agar terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh proses produksi.
 - b. Diharapkan bagi para industri untuk mendukung pelaksanaan program kali bersih Kota Semarang dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam menanggulangi pencemaran, seperti mengikuti aturan yang ada serta pengelolaan limbah harus dilakukan sebelum dibuang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2003. *Kebijakan Publik*

- Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro. *Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Darmono. 1995. *Lingkungan Hidup dan Pencemaran Hubungannya Dengan Taksologi Senyawa Logam..* Jakarta: UI-Press Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode- metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Daud, Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia)*. Bandung :PT.Alumni. Wahab, S.A. 2012. *Analisis Kebijakan dan Formulasi Kepenyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djudju Sudjana. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Widodo, Joko.2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Anaisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Emzir.2012. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: media Presssindo.
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis*

- Setiyadi, Iwan Tritenty. 2005. *Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Pekerjaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Kota Magelang. (Tesis).* Yogyakarta: MKPD Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan:** Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 1995 tentang Program Kali Bersih Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Perda No 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Perda No 5 Tahun 2012 Tentang Baku Mutu Air Limbah
- Subagyo, P. Joko.2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipt
- Sumber Lain:**
- <http://www.suaramerdeka.com/harian/0411/04/nas04.htm>. Diunduh pada Tanggal 14 November 2014 pukul 18.39 WIB.
- Sunu, P. 2001. *Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 14001.*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2012/11/28/136729/Kerusakan-Daerah-Aliran-Sungai-Kian-Mengkhawatirkan.
- Diunduh pada Tanggal 25 November 2014 pukul 18.39 WIB.
- Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Bandung : Alfabeta.
- <http://www.nawasis.com/sanitasi/archives/07-2013/4>. Diunduh pada Tanggal 25 November 2014 pukul 18.39 WIB.
- Syafiie, Kencana, Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik.* Jakarta : PT Rineka Cipta.

<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jateng/semarang.pdf>

Diunduh pada tanggal 25 November
2014 pukul 18.45 WIB.